

lembaga yang menegakkan kode etik yang bersifat fungsional tertutup. Keadaan inilah yang rentan membuat lembaga tersebut menjadi tertekan dan tentunya kurang bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Akibatnya, proses penegakan kode etik itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang ada serta berkaitan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran saya sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi konflik di internal MKD, perlu dilakukan perombakan total. MKD hendaknya melibatkan pihak-pihak lain diluar anggota MKD sendiri sehingga mekanisme pengawasan yang berbasis etika dapat terwujud lebih independen dan objektif. Sehingga MKD mampu berperan tidak hanya sekadar menjadi lembaga penjaga moral dan integritas anggota DPR melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik.
2. Perlu adanya keterbukaan publik dengan memberitakan atau menyampaikan putusan-putusan pelanggaran yang sudah berkekuatan hukum tetap, terutama pada pelanggaran dengan sanksi berat agar masyarakat dapat menilai lebih jauh mengenai pelaksanaan kode etik MKD sekaligus untuk mendorong percepatan peran dalam meningkatkan sistem kode etik.

Daftar Pustaka

Buku:

- Alfan, Muhammad. 2011. *Filsafat Etika Islam*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press. Jakarta.
- Arinanto, Satya & Triyanti, Nunuk. 2009. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. UI Press. Jakarta.
- _____. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtiar Baru-van hoeve. Jakarta.
- _____. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Setjen MKRI. Jakarta.
- _____. 2006. *Prihal Undang-Undang*. Konstitusi Perss. Jakarta.
- _____. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. cet-6. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bertenz, K. 2007. *Etika*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Fatwa, A.M. 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Kompas. Jakarta.
- Gaffar, Jenedri M. 2012. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Halim, Hamzah. 2015. *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*. Prenadamedia Group. Jakarta.

- Harahap, Sofyan S. 2010. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Salemba Empat. Jakarta.
- Haryatmoko. 2014. *Etika Politik dan Kekuasaan*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 1992. *Ilmu Negara*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin. 2018. *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. Ke-3 Kencana. Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Etika Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dan Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis Pusat Studi Yayasan Nusantara Bekerjasama dengan PT. Alumni. Bandung.
- Manullang. 1995. *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Marzuki, Laica. 2009. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mufid, Muhamad. 2009. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muttaqien, Raisul. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Cet-1. Nusamedia & Nuansa. Bandung.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV. Mandar Maju. Bandung.

- Nurdin, Nurliah. 2012. *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat: Rivalitas Kekuasaan antara Presiden & Legislatif*. MIPI. Jakarta.
- Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Purnomowati, Reni Dwi. 2005. *Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soemantri, Sri, dkk. 1999. *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali Ke Undang-Undang Dasar 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Soeroso, R. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Sinar Grafika. Jakarta.
- Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Thompson, Brian. *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, Edisi-3. Blackstone Press Ltd. London.
- Utrecht, U. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cet-4. PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtar. Jakarta.
- Wahyono, Padmo. 1983. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Ghalisa Indonesia. Jakarta.
- Ya'kub, Hamzah. 1993. *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar)*. CV, Diponegoro. Bandung.

Jurnal dan lain-lain:

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan*

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Jakarta: 2016).

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Sistem Norma Menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etika*, dalam <https://docplayer.info/68511290-Perkembangan-sistem-norma-menuju-terbentuknya-sistem-peradilan-etika-oleh-prof-dr-jimly-asshiddiqie-sh-1.html>

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, *Efektivitas Putusan Badan Kehormatan DPR/DPRD*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2011).

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Menegakkan Etika Memajukan Parlemen, Rekaman Seminar Nasional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Peran Badan Kehormatan Dalam Menjaga Harkat, Martabat, Kehormatan, dan Citra Lembaga Legislatif*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2013).

Elizabeth Elza Astari Retaduari dan Lukas S. Ispandriarno, *Hubungan Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi Pers dengan Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik (Studi Eksplanatif terhadap Wartawan Anggota PWI Cabang Yogyakarta)*, (Yogyakarta: 2013).

Holilah, *Etika Administrasi Publik, Jurnal Review Politik*, Volume 03 Nomor 02, Desember 2013.

Mujar Ibnu Syarif, *Contemporary Islamic Political Discourse On The Political Ethics Of State Officials*, *Shariah Journal*, Volume 22, No. 2, 2014.

Nur Habibi, *Praktik Pengawasan Etika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1, Juni 2014.

Saldi Isra, *Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat Sistem Trikameral di Tengah Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat*, Jurnal Konstitusi, Volume 1 No. 1, Juli 2004.

Sekretariat Jenderal DPR RI, *Laporan Lima Tahun DPR RI 2004-2009: Mengemban Amanat dan Aspirasi Rakyat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2009).

Sri Karyati, *Rekonstruksi Kelembagaan Penegakan Etika Parlemen*, Jurnal *Etika dan Pemilu*, Volume 1 No. 1, Juni 2015.

Sri Soemantri, "*Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*", Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum "*Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan*" Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (Surabaya 26-29 Juni 2007).

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.